



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini adalah merupakan salah satu wujud diimplementasikannya good governance dan adanya tanggung jawab instansi untuk melaporkan kepada pemberi mandat dan pemangku kepentingan atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini akan memberi arti bagi para penggunanya dan sebagai salah satu bentuk gambaran peranan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menuju “ Good Governance “.

Samarinda, 28 Januari 2020
Plt. Inspektur
Irbawas. Bidang Khusus,



M. Kurniawan, SE,Ak,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19701028 199703 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dicapai pada tahun 2019 serta seluruh program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2019 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan atas dokumen Penetapan Kinerja 2019 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Tahun 2018 ini juga menyajikan semua capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja dan Program serta Kegiatan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja baik pada level output maupun outcome kegiatan yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis- analisis yang dilakukan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini juga dapat mengidentifikasi sejumlah keberhasilan kinerja yang telah dicapai dan kegagalan-kegagalan sebagai perbaikan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan komitmen seluruh unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam

merealisasikan tanggung jawabnya kepada stakeholder. Target dan indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Penilaian kinerja atas Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dilakukan terhadap indikator output maupun outcome kegiatan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan cara membandingkan antara target indikator dengan realisasinya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 menggambarkan dan menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan 4 (empat) sasaran, 17 (tujuh belas) indikator dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 92,59%. Sedangkan untuk pencapaian 10 Program dan 14 Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan capai fisik **100%** dan realisasi keuangan 98,09%. Untuk melaksanakan semua aktivitas tersebut disediakan dana sebesar Rp. 27.306.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.046.813.563,00 (95,39%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.263.445.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.309.848.154,00 (91,53%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.042.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.736.965.409,00 (98,09%)

Dalam penyerapan anggaran secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran, tetapi secara kualitatif, pencapaian telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal dan bertanggung jawab berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Sisa anggaran terjadi karena adanya efisiensi dalam pengguna anggaran, namun secara fisik telah dilaksanakan 100%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program serta kegiatan masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, namun dapat diatasi dengan baik dan sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan, maka telah diambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit agar tercipta peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi realisasi perjanjian kinerja dan kualitas sumber daya manusia / personil aparat pengawasan selaku APIP.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2019 ini dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja yang dipergunakan sebagai alat pembanding pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Aspek Strategis Organisasi	6
F. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi	8
G. Sarana dan Prasarana	9
BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Laporan Hasil Evaluasi	26

B.	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	29
C.	Analisis Capaian Kinerja	32
1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kerja Tahun ini	32
2.	Membandingkan Antara Realisasi Kerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir	49
3.	Membandingkan Realisasi Kerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RPJMD/Renstra	61
4.	Analisis Progra/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	64
5.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	77
D.	Realisasi Anggaran	78
1.	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	78
2.	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	80
BAB IV	PENUTUP	83

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 s.d. 2023
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 dan 2019 secara berjenjang
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2018 dan 2019
4. Rencana Aksi Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019
5. Rencana Kerja Tahun 2018 dan 2019
6. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Prov. Kaltim Tahun Sebelumnya (Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya).
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan	6
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	9
Tabel 3	Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2019 s.d. 2023	14
Tabel 4	Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran	16
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	22
Tabel 7	Target Belanja Tahun 2019	24
Tabel 8	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	24
Tabel 9	Hasil Evaluasi Tahun 2019 atas LKjIP Tahun 2018	26
Tabel 10	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2019 atas LKjIP Tahun 2018	27
Tabel 11	Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2019	30
Tabel 12	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dipenghujung bulan Desember 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu tugas Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka

Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan, asset dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 53 Tahun 2016, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

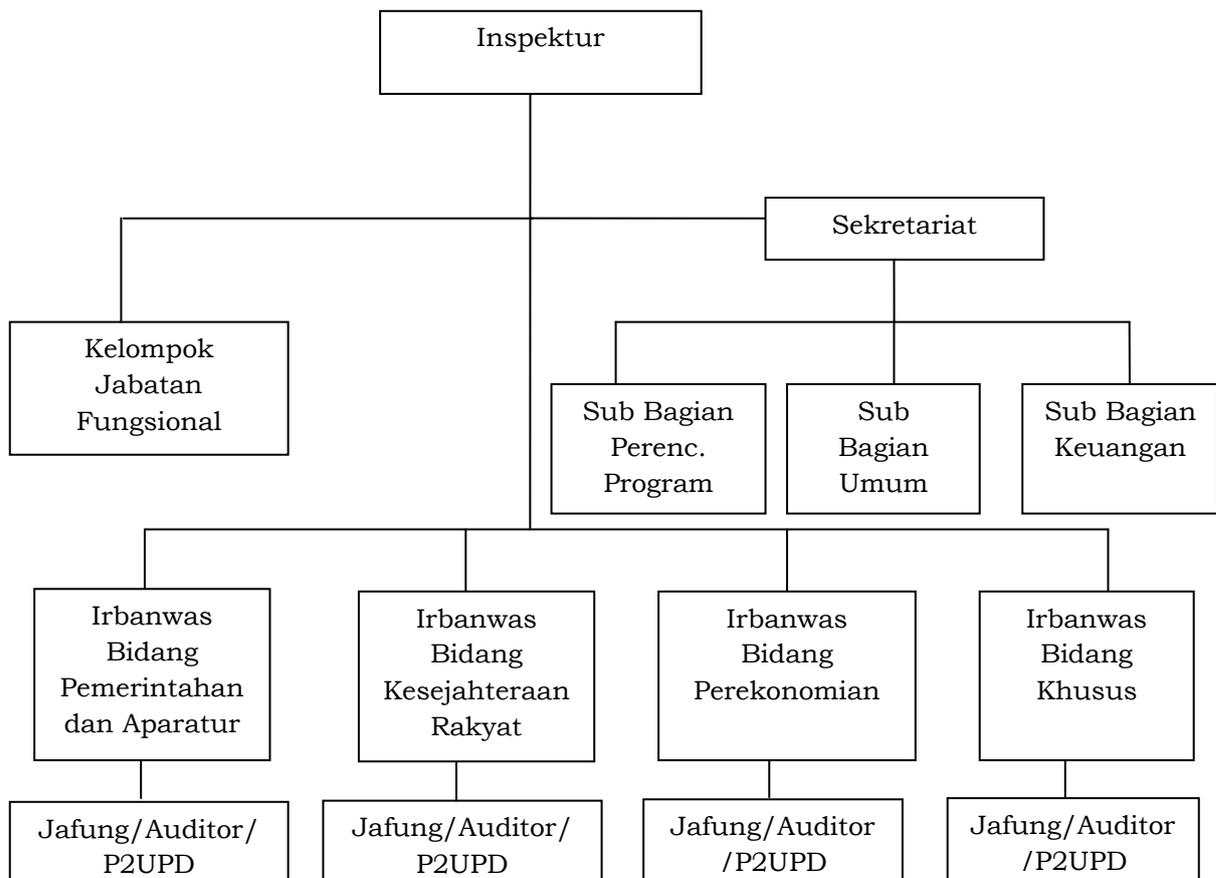
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



D. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 berjumlah pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 104 orang yang terdiri dari 77 orang PNS/ASN dan 27 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 104 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Tabel 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	22	12	6	28	-	-	5	29	-	-	-	-
Fungsional Umum	22	12	1	26	6	1	2	21	2	7	1	-
Jumlah PNS	50	27	14	56	6	1	11	56	2	7	1	-
Jumlah Honor/PTT	12	15	-	-	-	-	1	17	2	7	-	-
Jumlah PNS dan PTT	62	42	14	56	6	1	12	73	4	14	1	-

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Aspek strategis organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung visi dan misi, adalah baik aspek strategis internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. **Aspek Peraturan Perundang-Undangan**, dukungan peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis bagi organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. **Aspek Kompetensi SDM**, dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik segi kualitas dan kuantitas.
3. **Aspek Produk Yang Dihasilkan**, kekuatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan amanat PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008 harus bersifat strategis. Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Gubernur yang menjalankan amanah rakyat.
4. **Aspek Metode Pengawasan**, perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program pemeriksaan/pengawasan, reuiu, evaluasi dan monitoring, pemberian advis/saran dan konsulting dan kontrol internal.
5. **Aspek Sistem Penghargaan (Reward System)**, sistem penghargaan merupakan cara organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada pegawai dalam rangka menjaga keselarasan kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai atau pengukuhan atas perilaku yang telah dilakukan pegawai. Sistem penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi, mendorong pencapaian misi dan strategi organisasi, dan membantu mencapai keberlangsungan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai *shareholder*.
6. **Aspek Budaya Organisasi**, yang meliputi :
 - a. **Integritas**, suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh Aparatur Pengawasan untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas pribadi dan organisasi.
 - b. **Profesional**, kesanggupan seluruh Aparatur Pengawasan untuk melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi sikap dan semangat kerja tinggi,

berkomitmen, pantang menyerah dan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan yang tinggi.

- c. **Obyektif**, sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta metarial yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- d. **Independent**, sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
- e. **Perbaikan terus menerus**, sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan Organisasi untuk mencapai kaulitas pelayanan terbaik.

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018.

3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran, khususnya untuk kegiatan pengawasan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

G. SARANA DAN PRASARANA.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu adanya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2019 :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah	4.385	M2
2.	Gedung Kantor	2.300	M2
3.	Ruang Rapat	2	Ruang
4.	Ruang Kerja Pejabat Struktural	9	Ruang
5.	Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum	9	Ruang
6.	Ruang Arsip	7	Ruang
7.	Ruang Perpustakaan	1	Ruang
8.	Ruang Musholla	2	Ruang

9.	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
10.	Ruang Gudang Barang	4	Ruang
11.	Taman	1	Area
12.	Kendaraan Bermotor Roda 4	23	Buah
13.	Kendaraan Bermotor Roda 2	13	Buah
14.	Meja Kerja	151	Buah
15.	Meja Komputer	16	Buah
16.	Meja Rapat	8	Buah
17.	Meja Makan	1	Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan	1	Set
19.	Kursi Putar	269	Buah
20.	Kursi Tamu	9	Set
21.	Kursi Lipat (Rusak Berat)	44	Buah
22.	Kursi Rapat	10	Buah
23.	Lemari Besi Arsip	36	Buah
24.	Lemari Perpustakaan	2	Buah
25.	Filling Cabinet	29	Buah
26.	Buffet	13	Buah
27.	Komputer / Computer	53	Unit
28.	Printer	66	Unit
29.	Laptop	41	Buah
30.	Dispenser	9	Buah
31.	Mesin Tik	3	Buah
32.	Pesawat Telepon	10	Buah
33.	Camera	6	Buah
34.	Jam Dinding	4	Buah
35.	Mesin Photo Copy	1	Buah
36.	Whiteboard	6	Buah
37.	Proyektor / LCD	8	Buah
38.	AC Split	6	Buah
39.	Brandkas	2	Buah
40.	Microphone	27	Buah
41.	Intercom Mobil	1	Buah
42.	Buku Perpustakaan	885	Buah
43.	Mesin Absensi	3	Buah
44.	Kulkas	6	Buah
45.	Sound System	1	Set
46.	Speaker Besar	1	Pasang
47.	Ampliplayer	1	Unit
48.	TV Led	1	Unit
49.	Sofa	1	Unit
50.	Lemari Hias	1	Buah
51.	Mesin Cuci	1	Buah
52.	Karpet	3	Buah
53.	Rak Buku / TV	2	Set

54.	Organ / Electone	1	Buah
55.	Wireless	1	Buah
56.	Tempat Tidur	1	Set
57.	Lemari Pakai	2	Buah
58.	Water Heather	1	Buah
59.	Monitor CCTV	1	Buah
60.	Lensa CCTV	2	Buah
61.	Handy Talkie	3	Buah
62.	Locker Rak	8	Buah
63.	Komputer Mainframe / Server	1	Unit
64.	Jaringan Komputer	1	Unit
65.	Software Off-Line Komputer	3	Unit
66.	Rak Peralatan	1	Buah
67.	Mesin Hitung Manual	1	Buah
68.	Alat Ukur Altimeter	8	Buah
69.	CPU	1	Buah
70.	GPS	4	Buah
71.	Faximale	1	Buah
72.	Tape Rocerder	4	Buah
73.	Genset	1	Unit
74.	E-Spot Aspalt Highway	1	Set
75.	Gorden	3	Set
76.	Lemari Rak Arsip Besi	25	unit
77.	Handy Cam	2	unit
78.	Finger Print	4	unit
79.	Tablet / Gadget	5	unit
80.	Perangkat Meeting On Desk (MOD) Conference	1	set

Dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dalam hal ini masih dirasakan kurang. Meskipun demikian dapat membantu dan menunjang dalam tugas-tugas dibidang pengawasan, Dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pada perangkat daerah tidak ada lagi visi dan misi perangkat daerah, sedangkan visi dan misi perangkat daerah tersebut mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah atau gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Visi.

“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat “

2. Misi.

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

3. Tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peran untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Instansi pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.
4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

4. Sasaran.

Salah satu unsur dalam pencapaian kinerja yang akan memberikan hasil capaian kinerja yang optima, agar lebih dicapai tingkat keberhasilannya yang sudah ditergetkan, maka Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disajikan secara singkat gambaran penting dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023 yang memuat antara lain Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Target Tahunan dan Program./Kegiatan serta IKU yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 s.d. 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Maturitas SPIP Penda Level 3	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	1	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	0	2	4	6	8	10
			3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	88	90	92	95	98	100
			4	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	75	80	85	90	95	100
			5.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	%	70	80	85	90	95	100
			6	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	27	29	31	33	34	36
			7	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2	3	3	3	3	4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Maturitas SPIP Pemda Level 3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	5	6	6	7	7
			2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	5	5	6	6	7	7
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dari KKN	Hasil Penilaian Integritas Pemda Skor 85	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
			2	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :							
				LHKPN	%	54	60	65	70	75	80
				LHKASN	%	50	60	65	70	75	80
			3	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lap	10	15	20	25	30	35
			4	Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	60	65	70	75	80	85
			5	Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	1	1	1	1
6.	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	-	60	63	65	67	70			
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP Pada Level 3	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	1	Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	3	3	3	3	4
			2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	35	50	55	55	60	65

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	0	80	85	90	95	100
			2.	Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	0	1	2	3	4	5
			3.	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%	70	80	85	90	95	100
			4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	75,39	76	78	80	81	82

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja, maka diperlukan adanya Program dan Kegiatan yang menunjang sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4		5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	1.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	Program Penjamin Mutu Keuangan	Reviu Atas Laporan Keuangan
			2	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Pemeriksaan Kinerja OPD
			3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%		Pemeriksaan Operasional OPD

			4	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
			5.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti/ ditangani	%		
			6	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level		Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
			7	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Pemprov
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Evaluasi EKPPD Kab/Kota
			2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota		Evaluasi SAKIP Kab/Kota
2.	Terwujud nya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dari KKN	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	Program Pencegahan KKN	Pemeriksaan Khusus / Investigasi
			2	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian			Monev LHKPN dan LHKASN
				LHKPN	%		
				LHKASN	%		
			3	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lap		Pengendalian Gratifikasi
4	Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	Survey Penilaian Integritas				

			5	Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD		Pembangunan Zona Integritas
			6.	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	1	Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Peningkatan Level Kapabilitas APIP
			2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
			2.	Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	Program Peningkatan Saran dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan prasarana
			3.	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

			4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
--	--	--	---	--	-------	--	---

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalam Renstranya tahun 2019 s.d. 2023 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan dasar dari Penetapan Kinerja yang akan ditetapkan setiap tahunnya dengan targetnya selanjutnya akan dicapai dengan dukungan program dan kegiatan. Penetapan Indikator Utama ini didasarkan atas tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Timur serta disesuaikan dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Berikut ini disampaikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran dari tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 s.d. 2023.

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I	Inspektur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Jumlah Perangkat Daerah Yang berkinerja “ Tinggi “	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja “ Tinggi “ sesuai hasil pemeriksaan/Audit	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Belum optimalnya capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan operasional	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di bagi pagu anggaran Program dan Kegiatan di kali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim.	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Inspektur
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat	Inspektur Bidang Pengawasan Khusus.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	Belum optimalnya tindak lanjut atas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin	Inspektur Bidang Pengawasan Khusus.
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi	Unit Pengendalian Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Penda	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey	Inspektoral berkerjasama dengan BPS dan KPK.
		Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM	Tim Internal dan Eksternal ZI Menuju WBK/WBBM
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Belum optimalnya nilai/skor penilaian atas RB pada Perangkat Daerah	Nilai / Skor RB yang didapat setelah dilakukan evaluasi melalui LKE RB	Laporan Hasil Penilaian RB PD	Tim RB Inspektoral
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	Level Kapabilitas APIP Inspektoral	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	Inspektoral berkerjasama dengan BPKP
		Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Belum optimalnya dukungan SDM pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian	Inspektural

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.

Pada tahun anggaran 2019, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Timur dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja Tahun 2019 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2
		c.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3
		d.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	90
		e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29
		d.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80
		f.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	80
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	5
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	5
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100
		b.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	80
		c.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :	

			LHKPN	60
			LHKASN	60
		d.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	15
		e.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	65
		f.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	50

1. Rencana Anggaran Tahun 2019

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka pada tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan, ditetapkan program sebanyak 10 (sepuluh) dengan kegiatan sebanyak 14 (empat belas), dengan alokasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2019 sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 24.326.285.000,00 yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 9.313.445.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 15.012.840.000,00 dan setelah adanya anggaran perubahan di tahun 2019, maka jumlah anggaran tahun 2019 yang dikelola oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi sebesar Rp. 27.306.285.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 11.263.445.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 16.042.840.000,00. Ada kenaikan sebesar Rp. 2.980.000.000,00 yang dipergunakan untuk tambahan Belanja Pegawai dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Realisasi anggaran perubahan tahun 2019 dari anggaran sebesar Rp. 27.306.285.000,00 adalah sebesar Rp. 26.046.813.563,00 yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.309.848.154,00 (91,53%) dan Anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 15.736.965.409,00 (98,09%) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.343.580.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.331.580.000,00 (99,11%) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 13.396.010.000,00 realisasi sebesar Rp. 13.230.538.957,00

(98,77%), Belanja Modal sebesar Rp. 1.303.250.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.174.846.452,00 (90,15%).

2. Target Belanja Tahun 2019.

Dari dari anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 27.306.285.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 11.263.445.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 16.042.840.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 26.046.813.563,00 (95,39%).

Adapun realisasi keseluruhan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) sebagaimana perincian sebagai berikut :

Tabel 7
Target Belanja Tahun 2019

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp)	
1.	Belanja Tidak Langsung	11.263.445.000,00	10.309.848.154,00	91,53
2.	Belanja Langsung	16.042.840.000,00	15.736.965.409,00	98,09
	JUMLAH	27.306.285.000,00	26.046.813.563,00	95,39

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2019.

Dari dari anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 16.042.840.000,00, maka dapat dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dengan persentase adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	5.228.435.000,00	32,59	Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Operasional OPD, Reviu dan Monitoring Pengawasan
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	1.658.000.000,00	10,34	Kegiatan EKPPD Kab/Kota dan SAKIP Kab/Kota, Monev Dana Desa
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotismen	2.468.205.000,00	15,39	Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Pencegahan dan Pemberantasan KKN
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	3.674.500.000,00	22,91	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumbe Daya Aparatur melalui Diklat/Bimtek /Workshop dan dan Pelatihan di Kantor Sendiri

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 700/1375-Khusus/ltprov/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan hasil Evaluasi sebesar **78,85** atau predikat “ **BB** “ (**Sangat Baik**), sebagaimana tabel hasil evaluasi berikut ini :

Tabel 9
Hasil Evaluasi Tahun 2019 Atas LKjIP Tahun 2018

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2018	Nilai 2019	Tambah /Kurang /Tetap
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,36	26,36	Tetap
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,31	20,31	Tetap
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,57	12,22	+ 1,65
4.	Evaluasi Kinerja	10	8,17	8,29	+ 0,12
5.	Capaian Kinerja	20	9,98	11,66	+ 1,68
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,39	78,85	+ 3,45
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi.

Sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap LKjIP Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2019 terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti, yaitu :

Tabel 10
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2019 atas
LKjIP Tahun 2018

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP DARI
INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN SEBELUMNYA TAHUN 2018
(REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTINYA)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rencana Aksi
1.	Meningkatkan capaian nilai hasil akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh di tahun 2018 dalam katagori penilaian BB (Sangat Baik)	<p>Pada tahun 2019, hal ini menjadi perhatian utama, sehingga beberapa usaha yang telah dilakukan antara lain akan berusaha mempertahankan capaian yang telah mencapai A, meningkatkan capaian dari B menjadi A, dan capaian yang nilainya C akan ditingkatkan menjadi B atau A.</p> <p>Usaha yang akan dilakukan antara lain : 1. Apa yang telah ditargetkan akan dicapai secara maksimal, 2. Capai kinerja ditahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya, 3 Memberikan informasi kinerja yang dapat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Perbaikan atas ukuran keberhasilan terhadap indikator agar dapat dihitung dan dicapai secara maksimal. 2. Melakukan evaluasi atas Renstra sebagai Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 3. Melakukan evaluasi atas Sasaran dan Indikator yang telah didukung oleh anggaran yang memadai. 4. Melakukan evaluasi atas Dokumen PK agar selaras dengan Renstra/RPJMD 5. Dokumen PK yang telah ditetapkan dijadi sebagai dasar dari Penetapan Kontrak Kerja/Tugas Fungsi.

		diandalkan.	
2.	Melakukan upaya – upaya perbaikan yang konstruktif, sehingga berdampak meningkatnya capaian sasaran/kinerja organisasi baik output dan outcome yang ditetapkan dan dilaporkan.	<p>Upaya – Upaya perbaikan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dicapai setiap tahunnya. 2. Kualitas pengukuran kinerja dan implementasinya akan ditingkatkan dengan meningkatkan capaian kerjanya yang akan dievaluasi setiap triwulan sekali dan dilaporkan berkenaan kendala yang dihadapi dan upaya-upaya akan dilakukan dalam rangka solusinya. 3. Meningkatkan evaluasi internal yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. 4. Akan memanfaatkan informasi kinerja sebagai bahan penetapan tahun berikutnya yang disesuaikan dengan penetapan kinerja yang telah dibuat. 5. Akan meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya. 6. Meningkatkan informasi mengenai kinerja agar dapat diandalkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi atas Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan. 2. Melakukan evaluasi atas Pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan. 3. Melakukan evaluasi di internal dalam rangka pencapaian penetapan kinerja baik yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. 4. Memberikan informasi yang memadai atas Capaian Kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak yang berkompeten.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yang pengesahannya dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 24 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050.2/999.a/ltprov/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar 92,59 % sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11
Pengukuran Capaian Kinerja dan Program pada Inspektorat Prov. Kaltim
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)		(4)			
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	WTP	100	
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	0	0	
		c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	90	95,39	105,99	
		d.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	3	100	
		e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	28	96,56	
		f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	80	100	
		g.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	80	62,50	78,13	
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	5	8	160,00	
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	5	4	80,00	
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	100	100	
		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :	LHKPN	60	77,46	129,00
				LHKASN	60	61,32	102,00
		c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	15	27	180,00	
		d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	65	0	0	
e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1	0	0			
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	2	66,66	
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	50	44	88,00	

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Rp. 3.441.625.000,00	3.437.630.765,00	99,89
2.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 410.100.000,00	381.435.950,00	93,01
3.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 1.597.510.000,00	1.596.557.450,00	99,94
4.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp. 189.300.000,00	188.291.300,00	99,47
5.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Rp. 2.322.305.000,00	2.315.367.500,00	99,70
6.	Program Pengembangan Zona Integritas	Rp. 144.900.000,00	142.191.300,00	96,13
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 2.767.000.000,00	2.764.634.350,00	99,91
8.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.516.600.000,00	1.419.538.765,00	93,60

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 16 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikator telah dicapai sebesar 92,59 %. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	2	0	0

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 2 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 0 (nol) perangkat daerah dengan capaian 0%. Pencapaian ini berdasarkan hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 4 perangkat daerah yang menjadi sample, yaitu RSUD Kanujoso Balikpapan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Audit Kinerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :700/2043/Itprov/2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria penilaian meliputi : Sangat Tinggi (skor 90-100), Tinggi (skor 70-89), Sedang (skor 60-69), Rendah (skor 51-59) dan Sangat Rendah (skor <50). Dari hasil Audit Kinerja yang dilakukan pada perangkat daerah rata-rata nilai capaiannya adalah “ Sedang” (skor 60-69).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	90	95,39	105,99

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 90 % dan telah dicapai sebesar 95,82 % dengan capaian sebesar 105,99%, hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 95,39% dari target yang ditetapkan sebesar 90,00%, menunjukkan bahwa adanya adanya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan juga dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA. Hasil capaian ini didasarkan atas Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian dari capaian tersebut memang telah melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi masih ada beberapa program dan kegiatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini

disebabkan belum dilaksanakan secara maksimal dan masih terdapat sisa anggaran, karena keterbatasan waktu dan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	100

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain :

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap : (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi

peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.

2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

Dari hasil evaluasi tersebut disarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.
2. Mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

3. Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian yang telah direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan implementasinya.
4. Mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) pada Website Pemda.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
5.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	29	28	95,56

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq pada tahun 2019 ditarget sebanyak 29 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 28 perangkat dengan capaian 95,56%. Pencapaian ini tidak sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu dari 29 target dan baru 28 perangkat daerah yang mendapat katagori \geq B, yaitu 8 PD dengan katagori BB/Sangat Baik, 20 PD dengan katagori B/Baik, dan 9 PD dengan katagori CC/Cukup serta 1 PD dengan katagori C/Kurang. Dari hasil evaluasi keseluruhan terhadap SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan dengan hasil evaluasi 64,78 dengan katagori B/Baik.

Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja. Hal ini masih dirasakan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan, namun untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu, diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat

Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	80	100

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 80% dan telah dicapai 80% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang sesuai apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi

TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
7.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani	%	80	62,50	78,13

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 80 % dan telah ditindaklanjuti 62,50 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 8 pengaduan masyarakat terkait disiplin ASN yang telah diperiksa dengan capaian 78,13%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena ada beberapa rekomendasi terkait hukuman disiplin belum ditindaklanjuti dengan membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan. Namun hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN yang disebabkan antara meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/ASN telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam rangka pembentukan

kerakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	8	160

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 5 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota dengan capaian sebesar 160%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi terdapat 8 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan 2 Kabupaten mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya komitmen dari Pemda Kab Kab/Kota untuk meningkatkan capai kinerja yang didukung dengan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang

dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	5	4	80,00

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 5 Kab/Kota dan telah dicapai 4 Kab/Kota dengan capaian sebesar 80%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat Kementerian PAN-RB Nomor : B/119/AA.04/2019 tanggal 13 Agustus 2019 hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Tahun 2019, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota pada 5 Pemda Kab/Kota, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari hasil evaluasi, 4 Kabupaten mendapat Katagori B, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur sedangkan 1 Kabupaten yang mendapat katagori CC adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun secara Nasional dari 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur 6 Kabupaten/Kota sudah mendapat katagori B dan 4 Kab/Kota berada pada katagori CC. Terhadap capaian ini diharapkan pada

tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rancana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana dari semua 12 Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditangani dan dilakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian				
	LHKPN	%	60	77,46	129
	LHKASN	%	60	61,32	102

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 60% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 77,46% dengan capaian 129% dan penyampaian LHKASN sebesar 61,32% dengan capaian 102%. Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dimana dari jumlah yang wajib LHKPN sebanyak 590 orang dan yang telah Melaporkan : sebanyak 457 orang, tepat waktu sebanyak 304 orang, terlambat sebanyak 153 orang dan yang belum menyampaikan sebanyak 133 orang. Sedangkan untuk LHKASN dari yang wajib LHKASN sebanyak 4.427 orang sebagaimana yang telah ditetapkan, yang sudah lapor sebanyak 2.716 orang dan yang belum laporan sebanyak 1.712 orang. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun oleh Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim, namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	15	27	180

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 15 laporan dan telah dicapai 27 laporan dengan capaian sebesar 180%, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi ada peningkatan, meskipun belum semua penerimaan/penolakan gratifikasi ini dilaporkan oleh si penerima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi maupun ke Unit Gratifikasi KPK-RI. Namun dari capaian ini telah menunjukkan adanya kesadaran dari penerima untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Grattifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi dan diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	65	0	0

Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada nilai 65 dengan capaian masih 0 (nol), hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan belum tercapai. Kegiatan survey penilaian integritas pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Badan Statistik Provinsi Kalimantan Timur

sebagaimana Nota Kesepahaman antara Pemprov Kaltim dan BPS Prov. Kaltim Nomor : 119/1454.a/ltprov/2019, Nomor : 01/BPS/6400.92120/MoU/07/2019 tanggal 21 Juli 2019, yaitu dimulai dengan kegiatan sosialisasi, entery meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden sebanyak 130 responden, yaitu dari 60 responden internal dan 60 responden eksternal dan 10 responden eksper. Pencacahan responden internal dan eksternal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh BPS, sedangkan pencacahan responden eksper dilakukan oleh KPK. Terdapat 6 lokus yang menjadi sasaran Survey Penilaian Integritas Tahun 2019, yaitu antara lain Bapenda, Dinas PUPRPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Biro Adbang Setda Prov. Kaltim. Sedangkan pemilihan eksper yang terdiri dari ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah yang disampel, yaitu Inspektorat/Pengawas Internal, Auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Pensiunan (Pejabat Eselon II), Kepala Daerah/Sekda, Asosiasi Pengusaha, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, DPRD, Advokat, Tim Saberpungli, Polda, Kejati dan Muspida.

Hasil penilaian integritas belum dapat disampaikan, karena hasil penilaian integritas ini merupakan hasil dari penilaian BPS dan KPK yang masih dalam proses di KPK-RI..

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	0	0

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 0 perangkat daerah, hal ini menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2019 ini telah diusulkan untuk ditetapkan ZI menuju WBBM pada RSUD Kanujoso Balikpapan, berdasarkan penilaian pada tahun sebelumnya bahwa RSUD Kanujoso Balikpapan sudah mencapai Zona Integritas dengan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap RSUD Kanujoso Balikpapan telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah Zona Integritas Menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 700/K.258/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), namun hasil evaluasi oleh Tim Eksternal atau dari Kementerian PAN-RB belum diterima.

Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme dan Profesional APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	2	66,66

Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai level 2 dengan capaian sebesar 66,66%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Sesuai hasil penilaian oleh BPKP atas Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih berada pada level 2, hal ini sesuai hasil evaluasi dari 6 (enam) elemen penilaian, yaitu Peran dan

Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola. 3(tiga) elemen berada pada Level 2, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Praktik Profesional dan 3 (tiga) elemen berada pada Level 3, yaitu Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola. Dari penilaian keseluruhan berada pada Level 2. Dalam rangka pencapaian ke Level 3 dari rekomendasi hasil penilaian disampaikan agar Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. SDM pada Inspektorat belum memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan Audit Kinerja belum ada Pedoman/SOP Audit Kinerja. Pada tahun 2019 ini Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan dan mengikutsertakan SDM / Auditornya pada kegiatan Diklat Audit Kinerja dan telah dibuatkan Pedoman Dalam melakukan Audit Kinerja.
2. Manajemen Inspektorat belum menyusun dan melaksanakan program pengembangan profesional setiap SDM-nya. Pada tahun 2019 perencanaan profesional setiap SDM/Auditor sudah dibuat dari mulai perencanaan diklat, kebutuhan diklat dan diklat-diklat yang pernah diikuti oleh SDM/Auditor sudah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Inspektorat belum memiliki kapabilitas di bidang Manajemen Risiko dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) serta Perangkat Daerah belum memiliki kemampuan untuk menilai risiko. Pada tahun 2019 dalam rangka peningkatan kapabilitas Manajemen Risiko telah diikuti SDM/Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Diklat Manajemen Risiko baik yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Pihak Ketiga (Swasta) dan Perencanaan

yang dibuat sudah berbasis risiko dengan membuat pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Yang Berbasis. Selanjut terhadap perangkat daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan identifikasi risiko sampai pada tingkat rencana tindak lanjutnya. Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan Penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	50	44	88,00

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 50 orang dan telah dicapai 44 Orang dengan capaian sebesar 88,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 44 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan

Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator keberhasilan dari kinerja yang sudah ditetapkan, dimana akan terlihat adanya peningkatan maupun penurunan dari capaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2019 ini sejalan dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023 terdapat sasaran dan indikator yang berbeda pada tahun0-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan Visi dan Misi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Berikut ini disampaikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2019
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	$7=(6-5)/5*100$
a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	Capai atas Opini WTP dapat

						dipertahankan.
b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	%	-	-	0	Target tidak tercapai, karena hasil Audit Kinerja terhadap perangkat daerah masih berada pada tingkat Sedang.
c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	94,65	96,82	95,39	Terjadi penurunan pencapaian sebesar - 1,52%
d.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	2	2	3	Terjadi peningkatan sebesar 50%
e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq B	PD	19	25	28	Terjadi peningkatan sebesar 12%
f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	82	76	80	Terjadi peningkatan sebesar 5,27%
g.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	%	-	-	62,50	Terjadi peningkatan sebesar 62,50%, karena tahun sebelumnya tidak dimonitor

- Analisis pencapaian pada indikator kinerja Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terjadi stagnan atau dapat dipertahankan yaitu diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak tahun 2017 s.d. 2019. Hal ini disebabkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi telah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan/ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan Opini WTP ini adalah, antara lain : Diterapkannya kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adanya perbaikan atas

penatausahaan persediaan, perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, sertifikasi tanah dan pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua serta terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

- Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik pada tahun 2017 s.d. 2018 belum pernah dilakukan penilaian atas kinerja pada perangkat daerah, pada tahun 2019 hal ini baru dilaksanakan namun terhadap target yang ditetapkan tidak tercapai sesuai target, karena penilaian kinerja yang dilakukan pada Perangkat Daerah berdasarkan hasil Audit Kinerja pada Perangkat Daerah yang sesuai dengan 3 E (efisien, efektif dan ekonomis) terhadap program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Capaian program dan Kegiatan Perangkat Daerah terjadi penurunan sebesar -1,52%, hal ini disebabkan karena rendahnya daya serap yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terhadap anggaran yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Operasional yang dilaksanakan terhadap perangkat daerah. Diharapkan untuk maksimalnya penyerpaan anggaran yang tertuang dalam Program dan Kegiatan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meningkat monev melalui Aplikasi TEPPRA, melaksanakan rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA.

- Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2018 s.d. 2019 berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.
- Analisis Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B sejak tahun 2017 s.d. 2019 pencapaiannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 19 di tahun 2017, 25 di tahun 2018 dan 28 di tahun 2019, hal ini disebabkan berbagai upaya-upaya diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak

dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

- Analisis terhadap Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sejak tahun 2017 s. d. 2019 mengalami peningkatan dalam tingkat penyelesaiannya terhadap rekomendasi / saran yang disampaikan dalam hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini disebabkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2019
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	$7=(6-5)/5*100$
a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “Sangat Tinggi “ dalam	Kab/Kota	5	5	8	Terjadi peningkatan sebesar 60%

	Evaluasi KPPD					
b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	Kab/Kota	2	3	4	Terjadi peningkatan sebesar 34%

- Analisis terhadap Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari tahun 2017 s.d. 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 5 Kab/Kota di tahun 2017 dan 2018 meningkat 8 Kab/Kota di tahun 2019, hal ini disebabkan adanya komitmen dari Pemda Kab Kab/Kota untuk meningkatkan capai kinerja yang didukung dengan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.
- Analisis terhadap pencapaian Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B sejak tahun 2017 s.d. 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 4 Kab/Kota dengan katagori B, hal ini didasarkan atas hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat Kementerian PAN-RB Nomor : B/119/AA.04/2019 tanggal 13 Agustus 2019 hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Tahun 2019, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota pada 5 Pemda Kab/Kota, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari hasil evaluasi, 4 Kabupaten mendapat

Kategori B, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur sedangkan 1 Kabupaten yang mendapat kategori CC adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun secara Nasional dari 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur 6 Kabupaten/Kota sudah mendapat kategori B dan 4 Kab/Kota berada pada kategori CC. Terhadap capaian ini diharapkan pada tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rencana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2019
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7= $(6-5)/5*100$
a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	100	100	Stagnan tidak terjadi peningkatan/ penurunan
b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	%	- -	- -	77,46 61,32	Terjadi peningkatan sebesar 77,46% dan 61,32%, karena data tahun sebelum tidak termonitor
c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	-	-	27	Terjadi peningkatan sebesar 27%,

							karena data tahun sebelumnya tidak termonitor
d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	-	67,55	0		Terjadi penurunan, karena Hasil Penilaian belum diterima.
e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD	0	1	0		Terjadi Penurunan karena target tidak tercapai.

- Analisis terhadap pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani sejak tahun 2017 s.d. 2019 menunjukkan peningkatan dan tercapai 100%. Hal ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan SDM Aparatur Pengawasan serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.
- Analisis terhadap pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN sejak tahun 2017 s.d. 2018 kegiatan ini belum dilaksanakan, karena tidak termasuk dalam sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, baru di tahun 2019 sesuai dengan Visi dan Misi Pemprov Kaltim Tahun 2019 s.d. 2023. Pencapaian di tahun 2019 dengan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 77,46% dan penyampaian LHKASN sebesar 61,32% Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim. Dalam rangka

meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun oleh Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim, namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

- Analisis terhadap pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi sejak tahun 2017 s.d 2018, hal ini belum pernah dilaksanakan, dan baru pada tahun 2019 ini dilaksanakan dengan capaian 27 laporan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi ada peningkatan, meskipun belum semua penerimaan/penolakan gratifikasi ini dilaporkan oleh si penerima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi maupun ke Unit Gratifikasi KPK-RI. Namun dari capaian ini telah menunjukkan adanya kesadaran dari penerima untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Grattifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi dan diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi.
- Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak tahun 2018 telah dicapai dengan nilai 67,55 dan pada tahun 2019 kegiatan

survey penilaian integritas pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Badan Statistik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Nota Kesepahaman antara Pemprov Kaltim dan BPS Prov. Kaltim Nomor : 119/1454.a/Itprov/2019, Nomor : 01/BPS/6400.92120/MoU/07/2019 tanggal 21 Juli 2019, yaitu dimulai dengan kegiatan sosialisasi, entery meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden sebanyak 130 responden, yaitu dari 60 responden internal dan 60 responden eksternal dan 10 responden eksper. Pencacahan responden internal dan eksternal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh BPS, sedangkan pencacahan responden eksper dilakukan oleh KPK. Terdapat 6 lokus yang menjadi sasaran Survey Penilaian Integritas Tahun 2019, yaitu antara lain Bapenda, Dinas PUPRPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Biro Adbang Setda Prov. Kaltim. Sedangkan pemilihan eksper yang terdiri dari ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah yang disampel, yaitu Inspektorat/Pengawas Internal, Auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Pensiunan (Pejabat Eselon II), Kepala Daerah/Sekda, Asosiasi Pengusaha, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, DPRD, Advokat, Tim Saberpungli, Polda, Kejati dan Muspida. Hasil penilaian integritas pemda tahun 2019 belum dapat disampaikan, karena hasil penilaian integritas ini merupakan hasil dari penilaian BPS dan KPK yang masih dalam proses di KPK-RI..

- Analisis terhadap Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM sejak tahun 2017 s.d. 2018 hal ini sudah dibangun dengan menetapkan pilot project ZI menuju WBK/WBBM kepada perangkat

daerah yang bersifat pelayanan, dan ditahun 2018 telah ditetapkan Perangkat Daerah RSUD Kanujoso Balikpapan sebagai ZI Menuju WBK dan pada tahun 2019 ini kembali diusulkan RSUD Kanujoso Balikpapan untuk ZI menuju WBBM berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah Zona Integritas Menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 700/K.258/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), namun hasil evaluasi oleh Tim Ekstenal atau dari Kementerian PAN-RB belum diterima.

Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2019
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	$7=(6-5)/5*100$
a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	-	2	2	Stagnan tidak terjadi peningkatan / penurunan
b.	Tenaga Fungsional yang Pengawasan bersertifikat	Orang	39	36	44	Terjadi peningkatan sebesar 22,23%

- Analisis terhadap Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat sejak tahun 2018 s.d. 2019 sudah dilakukan penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan level 2, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan dimana hasil evaluasi dari 6 (enam) elemen penilaian, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber

Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola. 3(tiga) elemen berada pada Level 2, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Praktik Profesional dan 3 (tiga) elemen berada pada Level 3, yaitu Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola. Dari penilaian keseluruhan berada pada Level 2. Pada tahun 2019 upaya-upaya dalam mencahai level 3 telah dilaksanakan, antara lain dengan melaksanakan dan mengikutsertakan SDM / Auditornya pada kegiatan Diklat Audit Kinerja dan telah dibuatkan Pedoman Dalam melakukan Audit Kinerja, perencanaan profesional setiap SDM/Auditor sudah dibuat dari mulai perencanaan diklat, kebutuhan diklat dan diklat-diklat yang pernah diikuti oleh SDM/Auditor sudah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan mengikutsertakan SDM/Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Diklat Manajemen Risiko baik yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Pihak Ketiga (Swasta) dan Perencanaan yang dibuat sudah berbasis risiko dengan membuat pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Yang Berbasis. Selanjut terhadap perangkat daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan identifikasi risiko sampai pada tingkat rencana tindak lanjutnya. Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan Penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian.

- Analisis terhadap Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat sejak tahun 2017 s.d. 2019, hal ini sudah dilaksanakan dan mengalami peningkatan dari 39 orang tahun 2017, 36 orang ditahun 2018 terjadi penurunan disebabkan adanya yang pensiun dan ditahun 2019 sebanyak 44 orang dan terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi dan mengikutserta SDM Aparatur Pengawasan pada Diklat dan Ujian Sertifikasi Auditor.

3. Membandingkan Realiasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (RPJMD/Renstra).

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan terget jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang juga dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, bahwa pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terdapat Indikator yang harus dicapai dalam Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ada 2 indikator sesuai dengan misi 5 dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, yaitu :

- a. Level Maturitas SPIP Pemda.
- b. Hasil Survey Penilaian Integritas

Perbandingan pencapaian terhadap 2 indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	3	3	Terjadi peningkatan capaian yaitu pada level 2 menjadi level 3
2.	Hasil Survey Penilaian Integritas	Nlai	65	0	Masih menunggu hasil laporan dari KPK.

- Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2018 s.d. 2019 berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan

praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.

- Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak tahun 2018 telah dicapai dengan nilai 67,55 dan pada tahun 2019 kegiatan survey penilaian integritas pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Badan Statistik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Nota Kesepahaman antara Pemprov Kaltim dan BPS Prov. Kaltim Nomor : 119/1454.a/Itprov/2019, Nomor : 01/BPS/6400.92120/MoU/07/2019 tanggal 21 Juli 2019, yaitu dimulai dengan kegiatan sosialisasi, entry meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden sebanyak 130 responden, yaitu dari 60 responden internal dan 60 responden eksternal dan 10 responden eksper. Pencacahan responden internal dan eksternal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh BPS, sedangkan pencacahan responden eksper dilakukan oleh KPK. Terdapat 6 lokus yang menjadi sasaran Survey Penilaian Integritas Tahun 2019, yaitu antara lain Bapenda, Dinas PUPRPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Biro Adbang Setda Prov. Kaltim. Sedangkan pemilihan eksper yang terdiri dari ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah yang disampel, yaitu Inspektorat/Pengawas Internal, Auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Pensiunan (Pejabat Eselon II), Kepala Daerah/Sekda, Asosiasi Pengusaha, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, DPRD, Advokat, Tim Saberpungli, Polda, Kejati dan Muspida. Hasil penilaian integritas pemda tahun

2019 belum dapat disampaikan, karena hasil penilaian integritas ini merupakan hasil dari penilaian BPS dan KPK yang masih dalam proses di KPK-RI..

4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pada tahun anggaran 2019 telah ditetapkan 4 sasaran, 16 Indikator kinerja dan capaiannya 92,59% yang didukung program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2019. Program dan Kegiatan ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu Program dan Kegiatan Prioritas (utama) dan Program dan Kegiatan Penunjang.

Analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja/Penetapan Kinerja pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 16 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikator telah dicapai sebesar 92,59 %. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Dukungan Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan telah mendukung dan menunjang dalam tercapainya Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dimana dari hasil evaluasi atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi/perangkat daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	2	0	0

Dukungan program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dengan Kegiatan Pemeriksaan Kinerja OPD/ Audit Kinerja OPD belum dapat mendukung dan menunjang dalam pencapaian Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 2 perangkat daerah ternyata belum tercapai. Hal ini berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pemeriksaan Kinerja OPD/Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 4 perangkat daerah yang menjadi sample, yaitu RSUD Kanujoso Balikpapan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur rata-rata capaian kinerjanya masih bersifat sedang.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	90	95,39	105,99

Dukungan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dengan Kegiatan Pemeriksaan Kinerja OPD/ Pemeriksaan Operasional OPD telah mendukung dan menunjang dalam pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 90 % dan telah dicapai sebesar 95,82 %. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Pemeriksaan Operasional terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	100

Dukungan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan telah berhasil mendukung dan menunjang terhadap pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019 pada level 3. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234 /Level 3.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
5.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	29	28	95,56

Dukungan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pemda belum dapat mendukung dan menunjang capaian Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq pada tahun 2019 ditarget sebanyak 29 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 28 perangkat dengan capaian 95,56%. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Evaluasi atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Reviu atas LKjIP Pemprov. Kaltim. Kegagalan pencapaian ini bahwa, dari hari evaluasi ternyata dari 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi klinerja serta pencapaian kinerja. Hal ini masih dirasakan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan, namun untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu, diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	80	100

Dukungan Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan telah mendukung dan menunjang dalam pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yaitu 80%. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang tertuang dalam laporan Hasil Pengawasan berupa rekomendasi/saran yang harus dilaksanakan oleh Entitas/Obrik. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
7.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani	%	80	62,50	78,13

Dukungan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN dengan Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat belum dapat mendukung dan menunjang capai persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 80 % dan telah ditindaklanjuti 62,50 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan monev atas rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 8 pengaduan masyarakat terkait disiplin ASN yang telah diperiksa apakah telah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena ada beberapa rekomendasi

terkait hukuman disiplin belum ditindaklanjuti dengan membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	8	160

Dukungan Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan Pemeriksaan Kinerja SKPD telah memberikan dukungan dan menunjang dalam Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 5 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi atas LPPD Pemda Kota/Kota pada 10 Kab/Kota se Kalimantan Timur dengan hasil hasil evaluasi terdapat 8 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan 2 Kabupaten mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	5	4	80,00

Dukungan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda belum dapat mendukung dan menunjang Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 5 Kab/Kota dan telah dicapai 4 Kab/Kota. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Evaluasi atas SAKIP Pemda Kab/Kota dan pada Tahun 2019 ini Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat Kementerian PAN-RB Nomor : B/119/AA.04/2019 tanggal 13 Agustus 2019 hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Tahun 2019, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota pada 5 Pemda Kab/Kota, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari hasil evaluasi, 4 Kabupaten mendapat Katagori B, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur sedangkan 1 Kabupaten yang mendapat katagori CC adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. Terhadap capaian ini diharapkan pada tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rancana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100

Dukungan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN dengan Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat telah mendukung dan menunjang Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani yaitu 100% pengaduan masyarakat dapat ditangani. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang diterima dan tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Tingkat Kepatuhan Pemyampaian				
	LHKPN	%	60	77,46	129
	LHKASN	%	60	61,32	102

Dukungan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN dengan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN telah mendukung dan menunjang terhadap

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 60% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 77,46% dan penyampaian LHKASN sebesar 61,32%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan Evaluasi Wajib LHKPN dan LHKASN terhadap kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaannya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	15	27	180

Dukungan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN dengan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN telah mendukung dan menunjang terhadap Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 15 laporan dan telah dicapai 27 laporan. Kegiatan yang dilakukan melakukan monitoring dan evaluasi atas Laporan Gratifikasi yang disampaikan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), meskipun belum semua penerimaan/penolakan gratifikasi ini dilaporkan oleh si penerima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi maupun ke Unit Gratifikasi KPK-RI. Namun dari capaian ini telah menunjukkan adanya kesadaran dari penerima untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Grattifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi dan diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	65	0	0

Dukungan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN dengan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN belum dapat mendukung dan menunjang terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada nilai 65 dengan capaian masih 0 (nol), hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan belum tercapai. Pada tahun 2019 kegiatan survey penilaian integritas pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Badan Statistik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Nota Kesepahaman antara Pemprov Kaltim dan BPS Prov. Kaltim Nomor : 119/1454.a/ltprov/2019, Nomor : 01/BPS/ 6400.92120/MoU /07/2019 tanggal 21 Juli 2019, yaitu dimulai dengan kegiatan sosialisasi, entry meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden sebanyak 130 responden, yaitu dari 60 responden internal dan 60 responden eksternal dan 10 responden eksper. Pencacahan responden internal dan eksternal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh BPS, sedangkan pencacahan responden eksper dilakukan oleh KPK. Terdapat 6 lokus yang menjadi sasaran Survey Penilaian Integritas Tahun 2019, yaitu antara lain Bapenda, Dinas PUPRPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Biro Adbang Setda Prov. Kaltim. Sedangkan pemilihan eksper yang terdiri dari ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah yang disampel, yaitu Inspektorat/Pengawas Internal, Auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Pensiunan (Pejabat Eselon II), Kepala Daerah/Sekda, Asosiasi Pengusaha, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam

Negeri, DPRD, Advokat, Tim Saberpungli, Polda, Kejati dan Muspida. Hasil penilaian integritas belum dapat disampaikan, karena hasil penilaian integritas ini merupakan hasil dari penilaian BPS dan KPK yang masih dalam proses di KPK-RI..

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	0	0

Dukungan Program Pengembangan Zona Integritas dengan Kegiatan Penerapan Zona Integritas pada PD belum dapat mendukung dan menunjang terhadap Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 0 perangkat daerah. Pada tahun 2019 ini telah diusulkan untuk di tetapkan ZI menuju WBBM pada RSUD Kanujoso Balikpapan, berdasarkan penilaian pada tahun sebelumnya bahwa RSUD Kanujoso Balikpapan sudah mencapai Zona Integritas dengan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap RSUD Kanujoso Balikpapan telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah Zona Integritas Menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 700/K.258/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), namun hasil evaluasi oleh Tim Ekstenal atau dari Kementerian PAN-RB belum diterima.

Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme dan Profesional APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	2	66,66

Dukungan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan belum dapat mendukung dan menunjang terhadap pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai level 2. Sesuai hasil penilaian oleh BPKP atas Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih berada pada level 2, hal ini sesuai hasil evaluasi dari 6 (enam) elemen penilaian, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola. 3(tiga) elemen berada pada Level 2, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Praktik Profesional dan 3 (tiga) elemen berada pada Level 3, yaitu Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola. Dari penilaian keseluruhan berada pada Level 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	50	44	88,00

Dukungan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan belum dapat mendukung dan menunjang terhadap Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 50 orang dan telah dicapai 44 Orang. Pada tahun 2019, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 44 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

Berdasarkan analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan sangat berperan dalam pencapaian kinerja karena Program dan Kegiatan tersebut telah sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan. Meskipun ada beberapa sasaran dan indikator belum tercapai secara maksimal, namun dukungan program dan kegiatan juga turut menentukan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaiannya 100% atau diatas 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi. Input yang dimiliki dalam hal adalah anggaran dan SDM Aparatur Pengawasan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3		4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	100	99,37	0,63
		b.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	105,99	99,92	6,07
		c.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	100	93,10	6,90
		d.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	99,47	0,53
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	160,00	99,92	60,08
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	99,54	0,46
		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	129,00	99,73	29,27
				102,00	99,73	2,27
c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	180,00	99,73	80,27		

Tabel 12
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total APBD		Jumlah Program / Kegiatan Yang dialokasi		Total Program / Kegiatan	
					Belanja BTL	Belanja BL	Prog	Keg	Prog	Keg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017	7.100.000.000	6.898.948.035	0,97	97,17	8.945/791.000	7.100.000.000	7	9	11	16
2018	7.965.600.000	7.955.715.982	1,00	99,88	9.638.955.408	7.965.600.000	7	9	10	13
2019	16.042.840.000	15.736.965.409	1,91	98,09	11.263.445.000	16.042.840.000	10	14	10	14

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam sub ini akan menguraikan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	WTP	100	226.500.000	225.062.050	99,37
b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	0	0	120.000.000	104.000.000	86,67
c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	90	95,39	105,99	441.600.000	411.834.500	93,26
d.	Level Maturitas	3	3	100	135.000.000	130.500.000	96,67

	SPIP Pemda Kaltim						
e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	28	96,56	253.500.000	237.120.000	93,54
f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	80	100	189.300.000	188.291.100	99,47
g.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	80	62,50	78,13	100.000.000	85.500.000	85,50

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	5	8	160,00	529.545.000	527.542.000	99,62
b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	5	4	80,00	666.495.000	657.500.000	98,65

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	100	100	311.380.000	309.945.500	99,54

	yang ditangani						
b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	60 60	77,46 61,32	129,00 102,00	60.000.000	58.500.000	97,50
c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	15	27	180,00	60.000.000	55.500.000	92,50
d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	65	0	0	150.000.000	150.000.000	100,00
e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1	0	0	144.900.000	142.191.300	98,13

Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	2	66,66	135.000.000	132.500.000	98,15
b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	50	44	88,00	2.767.000.000	2.764.364.350	99,91

2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 untuk menunjang kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur setelah perubahan adalah sebesar Rp. 27.306.285.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.263.445.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.309.848.154,00 (91,53%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.

16.042.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.736.965.409,00 (98,09%).

Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran masing –masing Program dan Kegiatan tahun 2019 setelah perubahan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target / Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tidak Langsung	11.263.445.000	10.309.848.154	91,53	Fisik 100%
1.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.516.600.000	1.419.538.765	93,60	Fisik 100%
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.516.600.000	1.419.538.765	93,60	Fisik 100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.883.800.000	1.728.804.939	91,77	Fisik 100%
a.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.535.100.000	1.399.801.998	91,19	Fisik 100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	348.700.000	329.002.941	94,35	Fisik 100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.769.700.000	1.762.513.290	99,59	Fisik 100%
a.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	862.200.000	859.985.840	99,74	Fisik 100%
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	907.500.000	902.527.450	99,45	Fisik 100%
4.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	410.100.000	381.435.950	93,01	Fisik 100%
a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	410.100.000	381.435.950	93,01	Fisik 100%
5.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	3.441.625.000	2.437.630.765	99,98	Fisik 100%
a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	226.500.000	225.062.050	99,37	Fisik 100%
b.	Pemeriksaan Kinerja SKPD	3.215.125.000	3.212.568.715	99,92	Fisik 100%
6.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1.597.510.000	1.596.557.450	99,94	Fisik 100%
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	1.597.510.000	1.596.557.450	99,94	Fisik 100%
7.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	189.300.000	188.291.100	99,47	Fisik 100%
a.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil	189.300.000	188.291.100	99,47	Fisik 100%

	Pengawasan				
8.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2.767.000.000	2.764.634.350	99,91	Fisik 100%
a.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	2.767.000.000	2.764.634.350	99,91	Fisik 100%
9.	Program Pengembangan Zona Integritas	144.900.000	142.191.300	99,91	Fisik 100%
a.	Penerapan Zona Integritas pada SKPD	144.900.000	142.191.300	99,91	Fisik 100%
10.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	2.322.305.000	2.315.367.500	99,70	Fisik 100%
a.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	311.380.000	309.945.500	99,54	Fisik 100%
b.	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	2.019.925.000	2.005.422.000	99,73	Fisik 100%

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2019 yang berisikan capaian dan hambatan-hambatan dalam pencapaiannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019, yaitu terdapat 4 sasaran dan 17 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikator telah dicapai sebesar 92,59%.

Secara umum dapat dikemukakan pencapaian kinerja organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 dan langkah-langkah di masa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalah sebagai berikut :

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Capaian WTP.

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 dengan capaian Opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern serta Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

2. Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik dengan Capaian 0%.

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 2 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 0 (nol) perangkat daerah dengan capaian 0%. Pencapaian ini berdasarkan hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 4 perangkat daerah yang menjadi sample, yaitu RSUD Kanujoso Balikpapan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil Audit Kinerja yang dilakukan pada perangkat daerah rata-rata nilai capaiannya adalah “ Sedang” (skor 60-69).

3. Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan capaian 95,39%

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 90 % dan telah dicapai sebesar 95,82 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 95,39%. Namun demikian dari capaian tersebut memang telah melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi masih ada beberapa program dan kegiatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini disebabkan belum dilaksanakan secara maksimal dan masih terdapat sisa anggaran, karena keterbatasan waktu dan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

4. Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim dengan Capaian Level 3

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.

5. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B dengan Capaian 28 Perangkat Daerah

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq pada tahun 2019 ditarget sebanyak 29 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 28 perangkat dengan capaian 95,56%. Pencapaian ini tidak sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu dari 29 target dan baru 28 perangkat daerah yang mendapat katagori \geq B, yaitu 8 PD dengan katagori BB/Sangat Baik, 20 PD dengan katagori B/Baik, dan 9 PD dengan katagori CC/Cukup serta 1 PD dengan katagori C/Kurang. Dari hasil evaluasi keseluruhan terhadap SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan dengan hasil evaluasi 64,78 dengan katagori B/Baik.

6. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan Capaian 80%.

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 80% dan telah dicapai 80% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang sesuai apa yang diharapkan.

7. Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani dengan Capaian 62,50%

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 80 % dan telah ditindaklanjuti 62,50 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 8 pengaduan masyarakat terkait disiplin ASN yang telah diperiksa dengan capaian 78,13%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena ada beberapa rekomendasi terkait hukuman disiplin belum ditindaklanjuti dengan membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan.

8. Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD dengan Capaian 8 Kab/Kota.

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 5 Kab/Kota dan telah dicapai 8 Kab/Kota, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi terdapat 8 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten

Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan 2 Kabupaten mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu

10. Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dengan Capaian 4 Kab/Kota.

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 5 Kab/Kota dan telah dicapai 4 Kab/Kota dengan capaian sebesar 80%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat Kementerian PAN-RB Nomor : B/119/AA.04/2019 tanggal 13 Agustus 2019 hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Tahun 2019, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota pada 5 Pemda Kab/Kota, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari hasil evaluasi, 4 Kabupaten mendapat Katagori B, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur sedangkan 1 Kabupaten yang mendapat katagori CC adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun secara Nasional dari 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur 6 Kabupaten/Kota sudah mendapat katagori B dan 4 Kab/Kota berada pada katagori CC.

11. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dengan Capaian 100%.

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana dari semua Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditangani dan dilakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

12. Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKP dan LHKASN dengan Capaian LHKPN, 77,46% dan LHKASN, 61,32%.

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 60% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 77,46% dan penyampaian LHKASN sebesar 61,32%. Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dimana dari jumlah yang wajib LHKPN sebanyak 590 orang dan yang telah Melaporkan : sebanyak 457 orang, tepat waktu sebanyak 304 orang, terlambat sebanyak 153 orang dan yang belum menyampaikan sebanyak 133 orang. Sedangkan untuk LHKASN dari yang wajib LHKASN sebanyak 4.427 orang sebagaimana yang telah ditetapkan, yang sudah lapor sebanyak 2.716 orang dan yang belum laporan sebanyak 1.712 orang.

13. Jumlah Pelaporan Gratifikasi dengan Capaian 27 Laporan

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 15 laporan dan telah dicapai 27 laporan, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi ada peningkatan, meskipun belum semua penerimaan/penolakan gratifikasi ini dilaporkan oleh si penerima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi maupun ke Unit Gratifikasi KPK-RI.

14. Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda dengan Capaian Nilai 0 (Nol)

Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada nilai 65 dengan capaian masih 0 (nol). Kegiatan survey penilaian integritas pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Badan Statistik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Nota Kesepahaman antara Pemprov Kaltim dan BPS Prov. Kaltim Nomor : 119/1454.a/ltprov/2019, Nomor : 01/BPS/6400.92120/MoU/07/2019 tanggal 21 Juli 2019, yaitu dimulai dengan kegiatan sosialisasi, entery meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden sebanyak 130 responden, yaitu dari 60 responden internal dan 60 responden eksternal dan 10 responden eksper. Pencacahan responden internal dan eksternal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh BPS, sedangkan pencacahan responden eksper dilakukan oleh KPK. Terdapat 6 lokus yang menjadi sasaran Survey Penilaian Integritas Tahun 2019, yaitu antara lain Bapenda, Dinas PUPRPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Biro Adbang Setda Prov. Kaltim. Sedangkan pemilihan eksper yang terdiri dari ahli/tokoh yang dipandang

mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah yang disampel, yaitu Inspektorat/Pengawas Internal, Auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Pensiunan (Pejabat Eselon II), Kepala Daerah/Sekda, Asosiasi Pengusaha, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, DPRD, Advokat, Tim Saberpungli, Polda, Kejati dan Muspida. Hasil penilaian integritas belum dapat disampaikan, karena hasil penilaian integritas ini merupakan hasil dari penilaian BPS dan KPK yang masih dalam proses di KPK-RI.

15. Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/ WBBM dengan Capaian 0 (Nol) Perangkat Daerah.

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 0 perangkat daerah, hal ini menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2019 ini telah diusulkan untuk ditetapkan ZI menuju WBBM pada RSUD Kanujodo Balikpapan, berdasarkan penilaian pada tahun sebelumnya bahwa RSUD Kanujoso Balikpapan sudah mencapai Zona Integritas dengan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap RSUD Kanujoso Balikpapan telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah Zona Integritas Menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 700/K.258/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), namun hasil evaluasi oleh Tim Ekstenal atau dari Kementerian PAN-RB belum diterima.

16. Level Kapabilitas APIP Inspektorat dengan Capaian Level 2.

Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai level 2, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Sesuai hasil penilaian oleh BPKP atas Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih berada pada level 2, hal ini sesuai hasil evaluasi dari 6 (enam) elemen penilaian, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola. 3(tiga) elemen berada pada Level 2, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Praktik Profesional dan 3 (tiga) elemen berada pada Level 3, yaitu Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola. Dari penilaian keseluruhan berada pada Level 2.

17. Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dengan Capaian 44 Orang.

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 50 orang dan telah dicapai 44 Orang, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 44 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik

fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat, agar dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 28 Januari 2020

Plt. INSPEKTUR
IRBANWAS. BIDANG KHUSUS,



M. KURNIAWAN, SE, Ak, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19701028 199703 1 008